

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Agus Gadjong. (2007). *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Andi Abidin. (1987). *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: PT Medika
- Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*. Jakarta: PT Ghalia
- Ani Purwati, (2020), *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing
- Ariman dan Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Bambang Poernomo. (1992). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dadang Hawari. (2005). *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Rineka Cipta
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Lamintang. (2018). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Rusli Muhammad. (2017). *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Samidjo. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico
- Soesilo. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Aneka
- Tri Andrisman. (2007). *Hukum Pidana, Universitas Lampung*. Bandar Lampung: PT Ghalia
- Usfa. (2014). *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.

Wirjano Pradjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ketiga*. Bandung: PT Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro. (2018). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

B. Jurnal:

Mulyadi. (2014). *Darurat Miras Oplosan, Info Singkat Kesejahteraan Sosial*. Vol. VI, No. 24/II/P3DI

Ponglabba, Chant. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Volume VI. Lex Crimen.

Purwanta dan Yuliantari. (2009). *Penjatuhan Pidana Kepada Penjual "Minuman Keras Oplosan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang"*. Jurnal Analisis Hukum, Vol.2, No. 2.

Purwanta dan Yuliantari. (2019). *Penjatuhan Pidana Kepada Penjual "Minuman Keras Oplosan" yang Menyebabkan Matinya Seseorang*. Jurnal Analisis Hukum Universitas Pendidikan Nasional Bali.

Efendi. (2003). Kasus Minuman Keras Oplosan Dan Masalah Sosial Rakyat. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-November-2023-576.pdf, diakses tanggal 14 Juni 2024

C. Skripsi:

Farid, Miftah. (2021). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 204 Ayat 2 KUHP Tentang Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Membahayakan Nyawa Orang Lain*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Gusnandi, Andi. (2022). *Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 6.Pid.C/2018/PN.Mks)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Irmawati, (2013). *Analisis Kadar Asam Lemak Bebas (Alb) Pada Minyak Yang Digunakan Oleh Pedagang*. Skripsi. Aceh Barat.

D. Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP Pasal 1 butir 11

E. Peraturan-Peraturan:

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). (2014). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Cemarkan Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV 177

Putusan Pengadilan Kabupaten Lamongan No. 165/Pid.Sus/2020/Pn.Lmg